

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djalal, Hasjim. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- E. Likadja, Frans dan Daniel F. Bessie. 1985. *Hukum laut dan Undang-Undang Perikana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian. Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Misbach Muhjiddin, Atje. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Alumni.
- M., Ghufran. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M., Gianni, dan W. Simpson. 2005. *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry. Australian Government.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia..* Bandung: Yrama Widya.
- Rohingati, Sulasi. 2014. *Peneggelaman kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum laut Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian. Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rokhimin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan Pertama.
- Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Agoes, Ety. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Abardin.

- S. W. Sumardjono, Maria. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, Peter. 2003. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 9. Jakarta: Rajawali Press.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sumardjono, Maria S. W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Supramano, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika. Soemitro.
- Warasih, Esmi. 2005. *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widodo, J. 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulkifli dan Jimmpy. 2012. *Dictionary of Law*. Surabaya: Gramedia Press.

B. Jurnal, Artikel, Berita, Makalah dan Sumber Internet

- Akhmad Solihin, 2008, *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, Singapura.
- Berita online, Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>.

- Dewi Indira Biasane. 2009. Tesis. *Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkap Ikan Ilegal; Studi Kasus : Penangkap Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- FAO. 2012. *Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fiat Panis*. Dapat diakses secara online di http://www.imcsnet.org/imcs/docs/implementation_ipoa.pdf.
- FAO, *Pengelolaan Perikanan (Fisheries Managment)*, Divisi Publikasi FAO PBB, Roma 1997, hlm. 7. Dapat diakses secara online di <http://www.fao.org/publications/en/>.
- Jimly Asshiddiqie, Makalah, *Penegakan Hukum*, dapat diakses di http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara onlie di: [http:// kkp.go.id/index.php/ars](http://kkp.go.id/index.php/ars).
- . *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara onlie di http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9236/KKP-TERBITKAN-KEPMEN-PENANGGULANGAN-IUU-FISHING/?category_id=2.
- Kominfo Indonesia, 2000, *Data Food and Agriiculture Organization (FAO) Fisheries Department Staff, The State of World Fisheries and Aquaculture 2000*, FAO.
- Marhaeni Siombo. 2009. *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke*. Jakarta Utara 2008). Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana. UNJ. Jakarta.
- Marudut Hutajulu. 2014. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia* (Studi Putusan No:03/Pid.Sus.P/2012/Pn.Mdn). Volume II Nomor I Februari 2014. *USU Law Journal*.
- Pride Rare, 2010, *Strategi Segitiga Karang (Coral Triangle)*, Indonesia.

Pusat Riset Teknologi Kelautan Badan Riset Kelautan dan Perikanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan,
Penggunaan VMS Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Rokhmin Dahuri. *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Majalah Samudera, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>.

Sekolah Tinggi Perikanan. *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara online di <http://www.stp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/860/KKP-Terbitkan-Kepmen-Penanggulangan-IUU-Fishing/>.

Susanto Masita, *Law Enforcement of Illegal Fishing In Arafura Sea*, dapat diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/3d820644ecf4698c467865141a42bcdc.pdf>.

Taufan, Aditya dan Imran. 2014. *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat 2014 Vol 2 No. 1

Tommy Sitohang, 2005/2006, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan Vol.4 No.2, April 2005/2006.

Usmawadi Amir. "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari—April 2013, dapat diakses secara online di: <http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Pene-gakan%20Hukum%20IUU%20Fishing%20menurut%20UNCLOS%201982%20.pdf>.

C. Perjanjian Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Internasional Regional Fisheries Management Organization (RFMO)

Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF 1995).

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing 2001 (IPOA-IUU Fishing).

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439.

Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/18/Men/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.16/Men/2010 tentang Pemberian Kewenangan SIPI dan SIKPI Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 60 (Enam Puluh) *Gross Tonnage* Kepada Gubernur.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.